

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Tentang Orientasi**

Kata orientasi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pertama, peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar. Kedua, pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Berkaitan dengan tugas dan fungsi anggota dewan dapat peneliti simpulkan bahwa orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan anggota dewan dalam mengabdikan dirinya. Hal ini karena anggota dewan bukanlah seorang pegawai atau karyawan dari suatu perusahaan.

Anggota dewan merupakan wakil rakyat di parlemen dengan tujuan turut serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam memajukan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tujuan bangsa Indonesia. Kemudian Larry Diamond ahli politik yang menekuni tentang perkembangan demokrasi dengan memperhatikan perkembangan penelitian mengenai budaya politik yang dirintis oleh Almond & Verba sampai pada kesimpulan bahwa budaya politik sebagai keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi

suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan peran dari masing-masing individu dalam sistem itu. Atau secara praktis budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.<sup>7</sup>

Sistem politik sebagai obyek budaya politik oleh David Easton diberi pengertian sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dimana nilai-nilai dialokasikan terhadap masyarakat. Dengan kata lain sistem politik merupakan bagian dari sistem sosial yang menjalankan alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan) yang bersifat otoritatif (dikuatkan oleh kekuasaan yang sah) dan mengikat seluruh masyarakat. Dalam masyarakat modern otoritatif atau kekuasaan yang sah yang memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekuasaan paksaan adalah negara. Karakteristik utama sistem politik menurut Easton yaitu unit sistem politik dan batas-batas, input dan output, deferensiasi, dan integrasi.<sup>8</sup>

Unit politik adalah aksi politik yang terstruktur dalam peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik. Batas-batas dimaksudkan adalah lingkungan sistem politik yang berupa kegiatan-kegiatan lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang mengikat untuk suatu masyarakat input dan output. Input merupakan masukan untuk bekerjanya

---

<sup>7</sup>Larry Diamond, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Terj. Tim IRE, Yogyakarta : IRE Press, hlm. 207.

<sup>8</sup>Ramlan Surbakti, 1984, *Perbandingan Sistem Politik*, Surabaya : MECPHISO GRAFIKA, hlm. 129-130.

sistem politik sedangkan output merupakan keluaran yang berupa keputusan yang mengikat. Deferensiasi merupakan perbedaan kegiatan yang dijalankan struktur politik dalam mengubah input menjadi output. Integrasi sistem merupakan mekanisme untuk memaksa untuk kerjasama struktur politik sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang mengikat.

Almond dan Coleman membedakan struktur politik atas infrastruktur struktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur struktur politik terdiri dari struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, dan sektor politik masyarakat. Suprastruktur politik terdiri dari sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, dan sektor politik pemerintahan.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan politik demokratis struktur politik ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat formal dan informal.<sup>10</sup> Struktur formal merupakan mesin politik yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat, sedangkan struktur informal merupakan struktur yang mampu memengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengonversikan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Termasuk dalam struktur informal ini adalah partai politik, kelompok-kelompok kepentingan.

---

<sup>9</sup> Budi Winarno, 2007, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta : MedPress, hlm. 85.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Menurut Almond dan Powell Jr. struktur politik dapat dibedakan ke dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijakan.<sup>11</sup> Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (*maintain or change*) struktur politik, dan secara khusus struktur menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Fungsi-fungsi sosialisasi politik merupakan fungsi bagaimana generasi muda dan anak-anak mendapatkan sosialisasi kehidupan politik dari berbagai institusi seperti keluarga, tempat-tempat ibadah, lingkungan kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Rekrutmen politik melibatkan proses bagaimana pemimpin-pemimpin politik direkrut melalui misalnya, partai-partai politik. Komunikasi politik menjadi penyambung bagi keseluruhan sistem agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Tanpa adanya komunikasi politik energi yang berada dalam elemen-elemen sistem politik tidak dapat mengalir. Akibatnya sistem politik mengalami kemacetan.

Struktur proses politik melibatkan bagaimana fungsi-fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan dilaksanakan oleh struktur politik. Struktur proses melibatkan diantaranya kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, media massa, eksekutif, dan lain sebagainya dimana masing-masing struktur ini mempunyai peran politiknya masing-masing. Selanjutnya jika struktur proses dapat dipahami sebagai fungsi-fungsi proses dilakukan oleh

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 84

struktur-struktur yang sama untuk semua kebijakan maka struktur aspek-aspek kebijakan lebih pada kebijakan-kebijakan spesifik seperti kebijakan pertahanan, kebijakan pangan, dan lain sebagainya.

Komponen budaya politik diklasifikasikan menjadi 3 bentuk orientasi yaitu orientasi yang bersifat kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*) dan evaluatif (*evaluative*).<sup>12</sup> Orientasi yang bersifat kognitif meliputi pengetahuan/pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya seperti ibukota negara, lambang-lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Sementara itu orientasi yang bersifat afektif menyangkut perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran individu di dalamnya. Rosenbaum mengajukan orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik sebagai berikut:

- a. Orientasi terhadap struktur pemerintahan, meliputi: pertama; orientasi rezim, bagaimana individu mengevaluasi dan merespon terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-normanya. Kedua; orientasi terhadap input dan output pemerintah, bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk kebijakan publik dan kebijakan yang diputuskan pemerintah.

---

<sup>12</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1984, *Op.Cit.*, hlm. 16.

- b. Orientasi terhadap yang lain dalam sistem politik, meliputi: pertama; orientasi identifikasi, kesatuan politik, wilayah geografis dan kelompok dimana ia merasa memilikinya. Kedua; kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka, kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dalam kehidupan masyarakat. Ketiga; "aturan permainan", konsep individu tentang aturan mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan.
- c. Orientasi terhadap aktivitas politiknya, meliputi: pertama: kompetensi politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan. Kedua; *political efficacy*, perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.

Ketiga orientasi politik tersebut yaitu kognitif, afektif dan evaluatif sebagai komponen pembentuk tipe budaya politik. Almond dan Verba mengajukan tiga tipe budaya politik yang berkembang dalam suatu masyarakat atau bangsa yaitu tipe parochial (awak), subyek (kaula), dan partisipan. Orang/masyarakat yang bertipe budaya politik parochial bercirikan tidak memiliki orientasi/pandangan sama sekali, baik berupa pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi) dan penilaian (evaluasi) terhadap obyek politik (sistem politik). Ini berarti yang bersangkutan bersifat acuh tak acuh terhadap obyek politik. Tetapi meskipun tidak peduli terhadap obyek politik orang/masyarakat yang bertipe budaya politik parochial

tetap peduli terhadap nilai-nilai primordial seperti adat istiadat, etnis dan agama. Dengan kata lain tidak menaruh minat terhadap obyek politik yang luaskecuali pada tempat dimana ia terikat secara sempit. Sedangkan orang/masyarakat yang bertipe budaya politik subyek bercirikan memiliki orientasi terhadap *output* (hasil/pelaksanaan kebijakan publik) yang sangat tinggi tetapi orientasi terhadap *input* (pembuatan kebijakan publik) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik sangat rendah. Ini berarti dalam tipe budaya politik subyek kepatuhan/ketaatan yang tinggi terhadap berbagai peraturan pemerintah tetapi tidak disertai sikap kritis (menunjukkan kelemahan dan kekuatan/kebaikan suatu peraturan). Dengan kata lain peran yang dilakukan bersifat pasif.

Kemudian tipe budaya politik partisipan bercirikan di mana seseorang/masyarakat memiliki orientasi terhadap seluruh obyek politik secara keseluruhan (*input, output*) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik. Ini berarti seseorang/masyarakat bertipe budaya politik partisipan disamping aktif memberikan masukan atau aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan publik (*input*) juga aktif dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik (*output*) juga memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa dirinya sebagai aktor politik berkemampuan mempengaruhi kehidupan politik bangsa dan negaranya. Orang/masyarakat yang bertipe budaya politik partisipan disamping berperan aktif dalam proses politik juga tunduk pada hukum dan kewenangan pemerintah.

Dalam hal ini Afan Gaffar, bahwa budaya politik yang partisipatif (partisipasi) atau *civic culture* merupakan budaya yang akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil. Karena dalam budaya politik partisipan menyangkut suatu kumpulan keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi.<sup>13</sup> Mengenai bagaimana gambaran orientasi politik menentukan tipe budaya politik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Orientasi Politik sebagai Pembentuk Tipe Budaya Politik

ORIENTASI POLITIK	DIMENSI ORIENTASI POLITIK				TIPE BUDAYA POLITIK
	Sistem sebagai obyek umum	Obyek input	Obyek output	Pribadi sebagai obyek politik	
Kognitif	0	0	0	0	Parochial (awak)
Afektif	1	0	1	0	Subyek (kaula)
Evaluatif	1	1	1	1	Partisipan

Sumber: Gabriele A. Almond ; Sidney Verba, 1984, *Budaya Politik*, hlm. 19.

*Ket : 0 : tidak berpengaruh  
1 : berpengaruh*

Dalam penjelasan tabel diatas diungkapkan bahwa orientasi kognitif tidak mempengaruhi semua dimensi orientasi politik dikarenakan masyarakat tidak merasakan bahwa pemerintah telah sungguh-sungguh mempengaruhi kehidupan pribadi setiap hari. Bila ditanyakan tentang politik jawabannya apatis. Bahkan masyarakat tidak terlalu memunculkan gejolak yang berarti seperti masa setelah reformasi dimana setiap pemilu selalu banyak mahasiswa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan yang melakukan demonstrasi

<sup>13</sup> Afan Gafar, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 101.



sehingga dapat disimpulkan tipe budaya politiknya merupakan budaya politik parochial.

Sedangkan bila melihat orientasi afektif akan berpengaruh pada system sebagai obyek umum dan obyek output pada dimensi orientasi politik yang dalam artian Masyarakat kurang mengambil peran dalam jalannya sistem politik di Indonesia. Kecuali bagi para mahasiswa yang memang sudah dituntut aktif untuk memberikan sumbangsuhnya untuk memperbaiki perpolitikan di Indonesia. Tapi apabila dilihat dari kaca mata global, masyarakat Indonesia tidak menjalankan perannya dalam sistem politik, dan pada tabel diatas menunjukkan bahwa orientasi evaluatif berpengaruh pada semua dimensi orientasi politik namun pada kenyataanya sebagian besar yang peduli pada kegiatan politik dan sistem politik hanya dari kalangan akademisi dan para profesional politik. Sedangkan warga yang lain, khususnya masyarakat bawah lebih bersikap acuh dan tidak mau berkecimpung terhadap sistem politik.

Almond & Verba menyatakan budaya politik kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan budaya politik campuran antara awak, kaula dan partisipan.<sup>14</sup> Budaya politik ini merupakan budaya politik yang seimbang dalam mana terdapat kegiatan politik, keterlibatan dan rasionalitas (karakteristik budaya politik partisipan) tetapi dimbangi oleh kefasifan dan tradisionalitas (ciri budaya politik kaula), dan keterikatan pada nilai-nilai primordial (ciri budaya politik awak). Konkretnya budaya politik kewarganegaraan merupakan

---

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti, 1984. *Op.Cit.*, hlm.69.

kombinasi yang seimbang antara karakteristik-karakteristik berikut: aktif, rasional (tidak emosional), dan mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap sesama warga negara, dan keterikatan pada keluarga, suku, dan agama. Oleh karena itu dalam budaya politik kewarganegaraan orientasi politik partisipan dikombinasikan dengan dan tidak menggantikan orientasi politik kaula dan awak. Sedangkan Afan Gafar memberikan istilah *civic culture* dengan budaya politik partisipan sebagai budaya politik yang demokratik.<sup>15</sup>

Menurut Larry Diamond teori-teori terkemuka tentang demokrasi baik klasik maupun modern mengklaim bahwa demokrasi memerlukan seperangkat nilai dan orientasi politik tersendiri dari warganya; moderasi, toleransi, keberadaban, keefektifan, pengetahuan, dan partisipasi.<sup>16</sup> Kepercayaan dan anggapan pada legitimasi rezim telah lama diakui sebagai faktor penting dalam perubahan rezim, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan atau kemacetan demokrasi. Selanjutnya Ronald Inglehart menunjukkan bahwa kepuasan hidup, kepercayaan antar pribadi, dan penolakan terhadap perubahan revolusioner bukan hanya berkorelasi tinggi dengan pembangunan ekonomi tetapi juga dengan stabilitas demokrasi dan bahwa

---

<sup>15</sup> Afan Gafar, 2002, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>16</sup> Larry Diamond, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 205.

“budaya politik mungkin merupakan mata rantai penghubung yang penting antara pembangunan ekonomi dan demokrasi”.<sup>17</sup>

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan. Gabriel Abraham Almond dan Sidney Verba mengatakan bahwa budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Rusadi Sumintapura mengatakan bahwa budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Samuel Beer mengatakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dari definisi-definisi di atas tampak bahwa budaya politik menunjuk kepada orientasi dan tingkah laku individu/masyarakat terhadap sistem politik. Menurut Almond dan Powell orientasi individu terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif.

Orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya pengetahuan seseorang mengenai sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol yang dimiliki oleh

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 206.

sistem politiknya secara keseluruhan seperti, ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll. Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu terhadap sistem politik, sehingga seorang dapat menerima atau menolak sistem politik tertentu. Orientasi evaluatif yaitu penilaian moral seseorang terhadap sistem politik dengan menggunakan informasi dan perasaan tentang kinerja suatu sistem politik serta penilaian didasarkan pada norma-norma yang dianut dan sepakati bersama. Ketiga aspek di atas adalah satu kesatuan, misalnya untuk dapat menilai seorang pemimpin, maka seseorang warga negara harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan seseorang terhadap suatu simbol politik sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Dalam pendekatan perilaku terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang.

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik yaitu; komponen kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan

keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Komponen afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Komponen evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.<sup>18</sup>

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisahkan tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya pengetahuan orang tersebut tentang sesuatu simbol politik misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

---

<sup>18</sup> Opcit, halaman 99-100

Karena hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subyektif bagi politik. Karena kebudayaan politik hanya merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain. Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem. Di samping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologi sosial, dan terminal terakhir bertumpu pada status sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap dan tingkah laku politik.

Alfian menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas.<sup>19</sup> Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian nampaknya menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.<sup>20</sup>

Mar'at yang menetapkan bahwa sikap suatu kecenderungan berperilaku adalah produk dari proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya. Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa perilaku politik yang diperoleh melalui sosialisasi politik tak pernah hadir di kehampaan budaya. Budaya politik adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti; kebutuhan, SINA (Sitem Nilai dan Asumsi) dan SKSM (Sistem Koordinasi Senso Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh

---

<sup>19</sup> Dr. Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, halaman 244-245

<sup>20</sup> Dr. Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1985, halaman 24

sistem politik itu sendiri serta harapan-harapan politik apa yang dimilikinya, biasanya akan bercampur baur dengan prestasi di bidang peradaban.<sup>21</sup>

Beberapa definisi sikap yaitu berorientasi kepada respon; sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*Unfavourable*) pada suatu obyek politik. Berorientasi kepada kesiapan respon; sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek politik dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon dan suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial politik yang telah terkondisikan. Berorientasi kepada skema triadik; sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif dan afektif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu obyek politik di lingkungan sekitarnya. Secara sederhana sikap didefinisikan sebagai ekspresi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap beberapa hal.<sup>22</sup>

Komponen atau struktur sikap menurut Mar'at yaitu:

1. Komponen kognisi yang berhubungan dengan *believe* (kepercayaan atau keyakinan), ide, konsep persepsi, stereotype, opini yang dimiliki individu mengenai sesuatu; dan

---

<sup>21</sup> Mar'at, Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 25-26

<sup>22</sup> Ibid, halaman 8-9



2. Komponen Afeksi yang berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang menyangkut perasaan individu terhadap obyek sikap dan menyangkut masalah emosi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap; pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi/lembaga pendidikan dan agama, dan faktor emosional. Eagly & Chaiken mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap obyek politik yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap obyek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku.<sup>23</sup>

Menurut ahli psikologi sosial yang memandang bahwa belajar sebagai suatu proses yang berakhir dengan terjadinya perubahan pola tingkah laku seseorang. Menurut para ahli itu bahwa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat termasuk didalamnya nilai-nilai politik senantiasa mengalami proses transformasi, pemahaman dan internalisasi ke dalam individu melalui tiga mekanisme utama yakni asosiasi, peneguhan dan imitasi, di mana tingkah laku para aktor politik penting ditiru, sebagai bagian dari perilaku masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Kras, S. J. "Attitudes and Prediction of Behavior," *Personality and Social Psychology Bulletin*, Januari 1995, hal. 58-75

<sup>24</sup> Arifin Rahman, *Op.cit*, hal. 36

Dari tiga proses di atas apa yang disebut nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk budaya politik diwariskan dari generasi ke generasi untuk kemudian mendikte orientasi, sikap dan tingkah laku politik warga budaya. Pada dimensi inilah keterkaitan antara budaya politik dengan orientasi, sikap dan tingkah laku politik, termasuk didalamnya partisipasi politik. Dimensi lain yang cukup mendasar perlu dicermati adalah refleksi dari proses budaya politik masyarakat dalam upaya menjabarkan kekuasaan masyarakat sebagai cerminan wajah nyata dari orientasi, sikap dan tingkah laku. Selain itu budaya politik juga merupakan dialektika dari suatu masyarakat politik dalam menjawab tantangan-tantangan politik yang menghalangi pada setiap fase pematangan perkembangannya.

Penelitian kebudayaan politik ditandai adanya titik pusat perhatian pada masalah-masalah sosialisasi dan pengalaman-pengalaman politik yang dialami oleh berbagai pihak, yang diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya serta situasi di mana kebudayaan politik itu berubah. Penelitiannya dapat pula menjurus pada suatu perspektif baru dari perjalanan sejarah suatu masyarakat dengan memberikan perhatian utama yakni, bagaimana kepercayaan politik yang asasi dipengaruhi oleh ingatan atas peristiwa-peristiwa politik masa lampau.

Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrinnya dan aspek generikanya. Pertama, menekan pada isi atau materi budaya politik yang dapat dijumpai pada studi tentang doktrin; seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme dan

Islam. Kedua, aspek generika menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik. Umpunya apakah budaya politiknya militan, utopis, terbuka atau tertutup. Pada aspek generikanya dari budaya politik, dapat dilihat dari hakekat, bentuk dan peranannya.<sup>25</sup>

Hakekat atau ciri-ciri pokok dari budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup. Nilai-nilai yang dimaksud ini berhubungan dengan masalah tujuan, seperti nilai-nilai pragmatis atau utopis.<sup>26</sup>

Almond dan Powell mencatat bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*).<sup>27</sup> Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya kelompok-kelompok yang bekerjasama memungkinkan timbulnya konflik. Dengan demikian kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat tetapi juga merupakan ciri budaya politik.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini

---

<sup>25</sup> Op.cit, Arifin Rahman, halaman 36-37

<sup>26</sup> Ibid, hal. 37

<sup>27</sup> Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comprative Politic A Developmental Approach* seperti dikutip Rusadi K, 1988, halaman 42

terjadi karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat.

## 2.2 Tinjauan Tentang Motivasi

Setiap orang tidak hanya berbeda dalam kemampuan melakukan sesuatu tetapi juga dalam motivasi mereka melakukan hal itu. Motivasi orang bergantung pada kuat lemahnya motif yang ada. Motif berarti suatu keadaan di dalam diri seseorang (*inner state*) yang mendorong, mengaktifkan, menggerakkan dan menyalurkan perilaku ke arah tujuan.<sup>28</sup> Peranan manusia dalam mencapai tujuan tersebut sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki organisasi, maka haruslah dipahami motivasi manusia bekerja pada suatu organisasi, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja atau dengan kata lain perilaku merupakan cerminan yang paling sederhana dari motivasi.

Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan.<sup>29</sup> Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa motivasi adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan

---

<sup>28</sup> Koontz, Harold, *Manajemen, Edisi Kedelapan*, Jakarta, Erlangga, 1990, hlm. 112.

<sup>29</sup> Winardi, *Kepemimpinan dan Manajemen*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 312.

pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai.<sup>30</sup> Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan atau daya yang timbul dari diri, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk melakukan suatu pekerjaan.

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.

### 2.2.1 Jenis-Jenis Motivasi

Menurut Sardiman, motivasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>31</sup>

a. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motif-motif (daya penggerak) yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri setiap individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu.

b. Motivasi Ekstrinsik

Dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada suatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

---

<sup>30</sup> Flippo, Edwin, *Manajemen Personalialia*, Jakarta, Erlangga, 2002, hlm. 112.

<sup>31</sup> Sardiman, A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, Grafindo, 2006, hlm. 89.

## 2.2.2 Metode Motivasi

Menurut Hasibuan, metode motivasi dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1. Metode Langsung

Merupakan motivasi materiil atau non materiil yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya. Motivasi ini dapat diwujudkan misalnya dengan memberikan pujian, penghargaan bonus dan piagam.

### 2. Metode Tidak Langsung

Merupakan motivasi yang berupa fasilitas dengan maksud untuk mendukung serta menunjang gairah kerja dan kelancaran tugas. Contohnya adalah dengan pemberian ruangan kerja yang nyaman, penciptaan suasana dan kondisi kerja yang baik.

## 2.2.3 Faktor-Faktor Motivasi

Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor menurut Hasibuan, yaitu:<sup>33</sup>

### a. Faktor Internal; faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas:

1. Persepsi individu mengenai diri sendiri; seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak;
2. Harga diri dan prestasi; faktor ini mendorong atau mengarahkan individu (memotivasi) untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat; serta dapat mendorong individu untuk berprestasi;
3. Harapan; adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku.
4. Kebutuhan; manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan

<sup>32</sup> Hasibuan, Malayu, *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 148.

<sup>33</sup> Hasibuan, Malayu, *Op. Cit*, hlm. 150.

seseorang untuk mencari atau menghindari, mengarahkan dan memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya.

5. Kepuasan kerja; lebih merupakan suatu dorongan afektif yang muncul dalam diri individu untuk mencapai goal atau tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku.

b. Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri atas:

1. Jenis dan sifat pekerjaan; dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai imbalan yang dimiliki oleh objek pekerjaan dimaksud.
2. Kelompok kerja dimana individu bergabung; kelompok kerja atau organisasi tempat dimana individu bergabung dapat mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku tertentu; peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan serta dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya dalam kehidupan sosial.
3. Situasi lingkungan pada umumnya; setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dengan lingkungannya.
4. Sistem imbalan yang diterima; imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku dalam mencapai tujuan; perilaku dipandang sebagai tujuan, sehingga ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan.

#### **2.2.4 Teori-Teori Motivasi**

Teori motivasi yang banyak dikemukakan oleh para ahli terbentuk dari definisi motivasi yaitu kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam individu itu sendiri (intrinsik) maupun dari luar individu (ekstrinsik).

Unsur intrinsik dan ekstrinsik tersebut yang mendasari motivasi inilah yang melahirkan teori-teori motivasi menurut para ahli.

#### 2.2.4.1 Teori Maslow

Teori Maslow menurut Reksomadiprodjo dan Handoko, membagi kebutuhan manusia sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kebutuhan Fisiologis  
Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya.
- b. Kebutuhan Rasa Aman  
Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpenuhi, maka muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja.
- c. Kebutuhan Sosial  
Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya.
- d. Kebutuhan Penghargaan  
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta efektifitas kerja seseorang.
- e. Kebutuhan Aktualisasi Diri  
Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya.

---

<sup>34</sup> Handoko, Hani T, dan Reksomadiprodjo Sukanto, *Organisasi Perusahaan*, Yogyakarta, BPFE, 1996, hlm. 69.



#### 2.2.4.2 Teori Herzberg (1966)

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor *hygiene* (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor hygiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah penerimaan (*achievement*), pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan dan lainnya (faktor intrinsik).<sup>35</sup>

#### 2.2.4.3 Teori Douglas McGregor

Mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negatif) dan teori Y (positif). Menurut teori X empat pengandaian yang dipegang manajer:<sup>36</sup>

- a. karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja
- b. karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan.
- c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab.
- d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja.

---

<sup>35</sup> Koontz, *Op. Cit*, hlm. 123.

<sup>36</sup> <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html?m=> di akses tanggal 13 Mei 2014.

Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia ada empat teori Y:

- a. karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain.
- b. Orang akan menjalankan pengarahannya dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran.
- c. Rata-rata orang akan menerima tanggung jawab.
- d. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif.

#### 2.2.4.4 Teori Vroom (1964)

Teori dari Vroom (1964) tentang *cognitive theory of motivation* menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:<sup>37</sup>

1. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas.
2. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan *outcome* tertentu).
3. Valensi, yaitu respon terhadap *outcome* seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan.

#### 2.2.4.5 Teori Clayton Alderfer ERG

Clayton Alderfer menyetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan (*existence*), hubungan (*relatedness*), dan pertumbuhan (*growth*). Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow.

---

<sup>37</sup> Koontz, *Op. Cit.*, hlm. 123.

Disini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi.<sup>38</sup>

#### **2.2.4.6 Teori Berprestasi McClelland (1961)**

Teori motivasi berprestasi mengemukakan bahwa, manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi diatas kemampuan orang lain. Teori ini memiliki sebuah pandangan (asumsi) bahwa kebutuhan untuk berprestasi itu adalah suatu yang berbeda dan dapat dibedakan dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

Seseorang dianggap memiliki motivasi untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain. Ada tiga jenis kebutuhan manusia menurut Mc Clelland, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi.<sup>39</sup>

##### **a. Kebutuhan akan Prestasi**

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri individu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah.

---

<sup>38</sup>Koontz, *Op. Cit*, hlm. 121.

<sup>39</sup> Handoko, Hani T, dan Reksohadiprodo Sukanto, *Op. Cit*, hlm 85.

- b. **Kebutuhan akan Kekuasaan**  
Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan.
- c. **Kebutuhan untuk Berafiliasi atau Bersahabat**  
Kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi.

Kebanyakan orang memiliki kombinasi karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja atau mengelola organisasi.

Karakteristik dan sikap motivasi prestasi menurut McClelland antara lain:

1. Pencapaian adalah lebih penting daripada materi.
2. Mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar daripada menerima pujian atau pengakuan.
3. Umpan balik sangat penting, karena merupakan ukuran sukses (umpan balik yang diandalkan, kuantitatif dan faktual).

Peneliti membuat kesimpulan tentang motivasi, dimana anggota dewan memiliki motivasi yang dipisahkan dengan tiga bagian menurut prestasi, kekuasaan atau kepentingan, dan afiliasi. Teori tersebut akan memisahkan bagaimana motivasi dari anggota dewan yang terpilih, apakah anggota dewan yang terpilih tersebut masuk kedalam salah satu dari teori motivasi yang disebutkan diatas.

### **2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Lembaga legislatif di Indonesia lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan ditingkat pusat sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Badan legislatif di Indonesia adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif dimana para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Struktur-struktur politik yang masuk kategori ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD karena dipilih langsung

oleh rakyat melalui pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
2. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang;
3. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut:

1. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.
2. DPRD sebagai unsur lembaga perwakilan daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah:

1. Legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah.

2. Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 juga memiliki tugas dan wewenang yang meliputi:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Mengusulkan:
  - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.
  - b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan atau pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
  - c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

5. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-



undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

#### **2.4 Pemilu Legislatif 2014**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat (bukan wakil partai) untuk duduk di lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan senantiasa tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pendapat Beetham & Boyle bahwa tujuan pemilu tingkat nasional ada dua yaitu; untuk memilih kepala pemerintahan atau kepalaeksekutif dan untuk menggolkan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih. Kemudian untuk memilih anggota-anggota lembaga perwakilan legislatif atau parlemen yang akan menetapkan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Suko, Susilo & Basrowi, *Demokrasi & HAM*, Kediri, Jengala Pustaka Utama, 2003, hlm. 62

Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Indonesia berikutnya diselenggarakan pada tahun 2014. Ini menjadi pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD langsung ketiga di Indonesia. Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2014 menggunakan model yang sama seperti model pemilihan umum pada tahun 2009 yaitu pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan sistem proposional terbuka, dimana yang berhak untuk duduk di lembaga legislatif adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak.

Adapun tahapan dari proses pemilu legislatif tahun 2014 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;

- j. Penetapan hasil Pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu di Indonesia dalam pelaksanaannya menganut sistem perwakilan proporsional terbuka, artinya presentase kursi DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum, khusus di daerah pemilihan.<sup>41</sup> Jadi jumlah kursi yang diperoleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam masyarakat. Misalnya 1 (satu wakil): 400.000 penduduk dikombinasikan lagi dengan daftar calon yang akan dipilih.

Adapun syarat-syarat partai politik yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

---

<sup>41</sup> Suko, Susilo & Basrowi, *Op. Cit*, hlm. 64

- e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas yang dimaksud dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah pemilihan umum di seluruh Indonesia yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat di parlemen, antara lain yaitu pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD yang dilaksanakan bertepatan pada tanggal 9 April 2014.

## **2.5 Kerangka Pikir**

Mengidentifikasi apakah yang menjadi orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro terpilih dalam mengabdikan di legislatif untuk masa jabatan 2014-2019. Anggota DPRD terpilih Kota Metro mempunyai orientasi yang berbeda-beda. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh

orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik yaitu: Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.

Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.<sup>42</sup>

Untuk mengetahui alasan seseorang berorientasi peneliti menggunakan teori motivasi dari David McClelland yaitu *McClelland's Achievement Motivation Theory* atau teori motivasi prestasi McClelland juga digunakan untuk mendukung hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian ini. Dalam teorinya McClelland mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia.

---

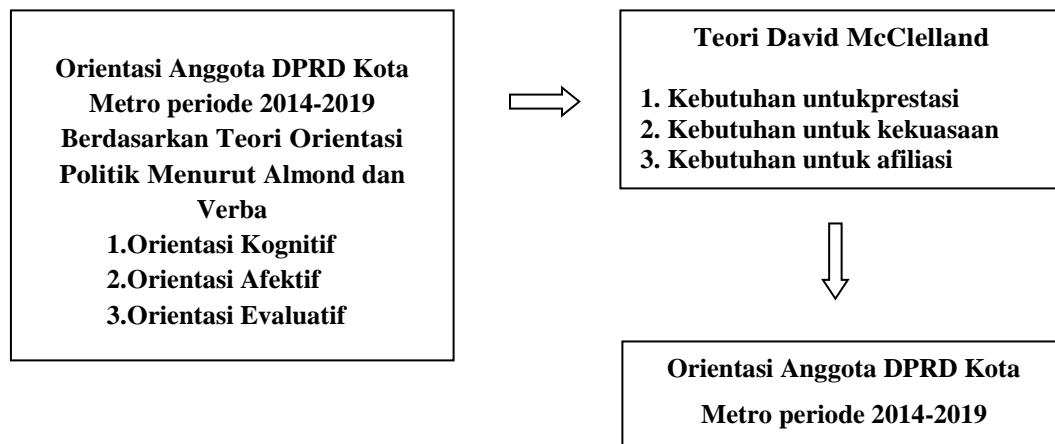
<sup>42</sup> Opcit, halaman 99-100

Seseorang dianggap memiliki motivasi untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain. Ada tiga jenis kebutuhan manusia menurut Mc Clelland, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi. Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses.

Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri individu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. Kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi

yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi.

Berdasarkan masalah yang ada maka dapat dibuat suatu kerangka pikir dari teori di atas dengan bagian-bagian yang ditunjukkan pada bagan di bawah ini mengenai orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro terpilih dalam mengabdikan di legislatif untuk masa jabatan 2014-2019.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir